

BAB I

PETA WILAYAH HUKUM

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan letak diantara 117° - 118° Bujur Timur dan 8° - 9° Lintang Selatan dengan batas sebagai berikut :

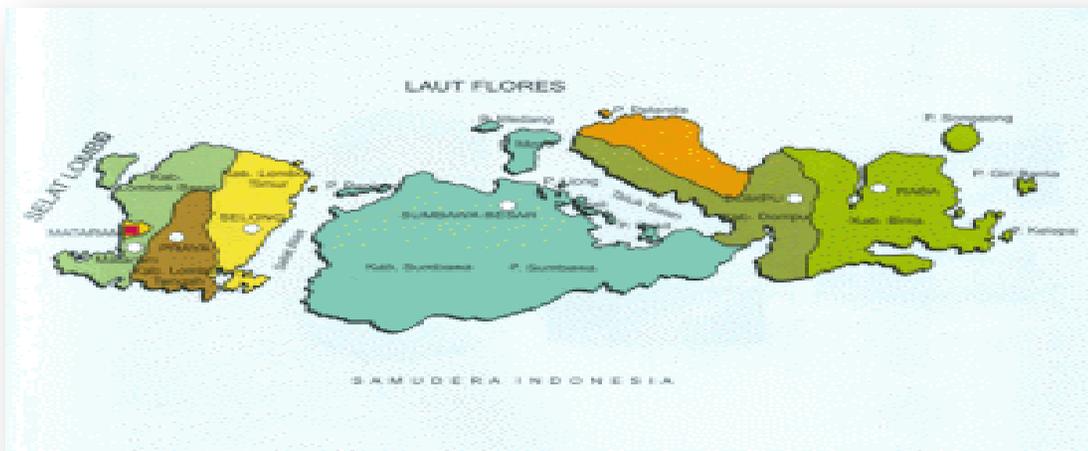
Sebelah Utara : Lautan Flores dan Kabupaten Bima

Sebelah Selatan : Lautan Indonesia

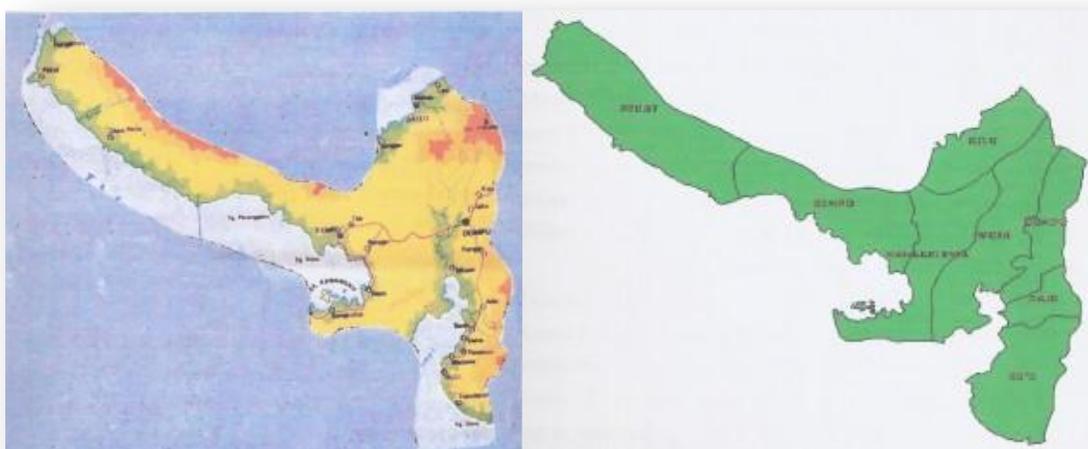
Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

Sebelah Timur : Kabupaten Bima

Peta Wilayah Propinsi NTB :



Peta Yurisdiksi PN Dompu :



Kabupaten Dompu meliputi beberapa kecamatan : Dompu, Woja, Hu'u, Kempo, Kilo, Pekat, pajo dan Kecamatan manggelewa dengan jumlah Desa/kelurahan 57 buah, 9 Kelurahan, 44 Desa difinitif, 4 Desa Persiapan. Dengan

luas wilayah mencapai 2.324,55 KM² dengan ketinggian kota berkisar antara 15-62 m diatas permukaan air laut, luas tersebut mencakup Pulau Satonda seluas 472 Ha.

Letak kabupaten Dompus yang berada diantara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima yang sebagian besar berupa perbukitan, selebihnya berupa lahan pertanian baik yang sudah dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana wilayah termasuk bangunan perkantoran, jalan maupun sarana lainnya.

Sarana transportasi umum yang dapat dipergunakan untuk mobilitas masyarakat berupa bemo / minibus, benhur (kendaraan berkuda sejenis andong atau cidomo) serta ojek. Sedangkan bis digunakan untuk angkutan antar kota antar kabupaten dalam propinsi bahkan sampai keluar wilayah Nusa Tenggara Barat.

Untuk sampai ke Kabupaten Dompus dapat ditempuh melalui perjalanan darat maupun udara, bila menggunakan sarana bis dari Mataram dapat ditempuh selama 10-12 jam perjalanan, termasuk menyeberangi Selat Alas menggunakan kapal laut sekitar 2 jam. Kalau menggunakan pesawat terbang menempuh jarak rute Denpasar – Bima selama sekitar 1 jam ditambah 2 jam perjalanan darat dari Bima ke Dompus, sedangkan pesawat dengan rute Mataram – Bima selama 1 jam 15 menit ditambah 2 jam perjalanan darat dari Bima ke Dompus.

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Dompus terletak di pusat Kota Dompus tepatnya di Jalan Beringin No. 2 Dompus atau tepat di depan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Dompus, Gedung Kantor Pengadilan Negeri Dompus terdiri dari dua bangunan, yaitu bangunan induk dan bangunan berbentuk “letter U”. Bangunan induk digunakan sebagai ruangan Ketua, Wakil Ketua, hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris dan ruangan administrasi non teknis, sedangkan ruang Panitera Pengganti dan Ruang sidang terletak pada bangunan “Letter U” dimana ruang sidang pada ujung-ujung bangunan tersebut.

BAB II

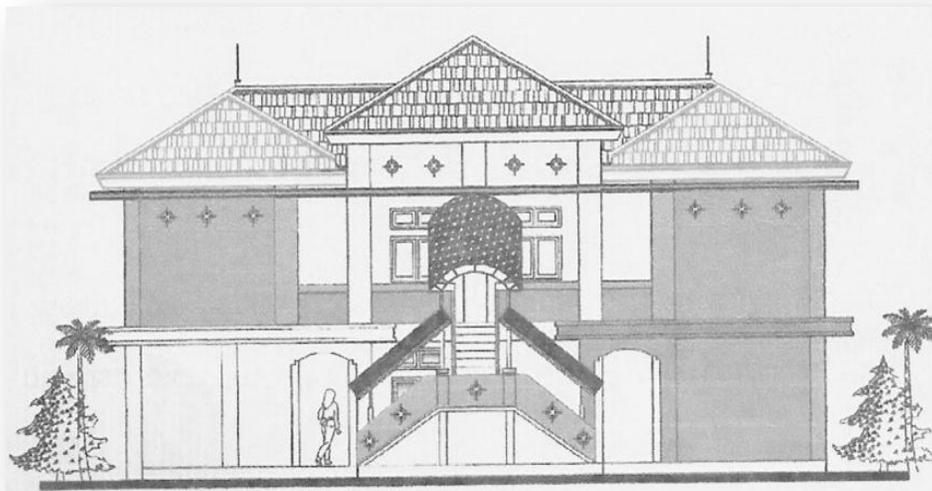
GEDUNG

A. Gambar (Foto)

KANTOR PENGADILAN NEGERI Klas II DOMPU



Nampak Dari Depan

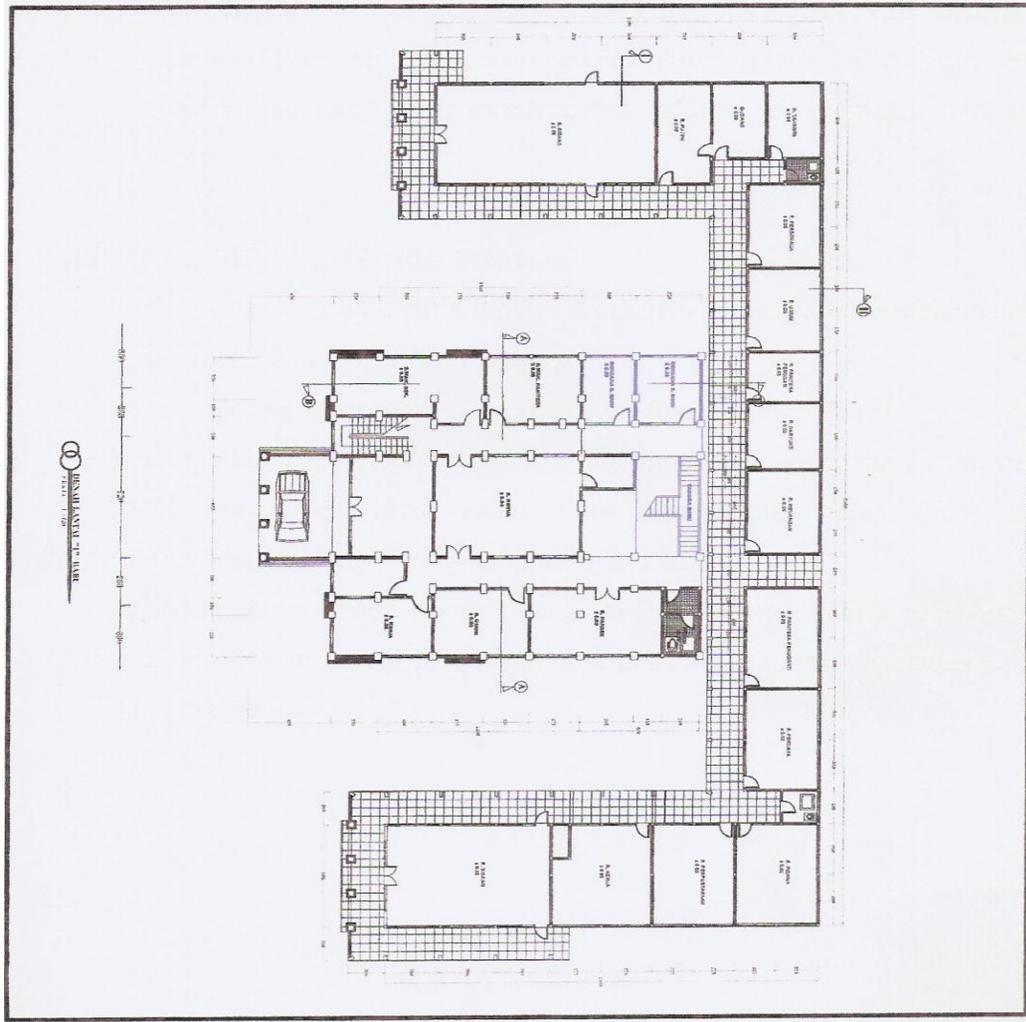


Nampak Dari Belakang



Nampak Dari Samping Kanan

B. Denah Gedung



C. Keterangan Tentang Gedung

1. Tanah tempat bangunan kantor merupakan tanah milik pemerintah RI yang kuasa penggunaannya oleh Pengadilan Negeri Dompu.
2. Gedung Kantor Induk Lantai I :
 Dibangun tahun 1973 sebanyak 7 (tujuh) ruangan dan 2 (dua) ruang WC, telah direhab menjadi 8 (delapan) ruangan dan 3 (tiga) rang WC berdasarkan DIPA T.A. 2007.
 Sedangkan Lantai II dibangun tahun 1973 sebanyak 2 (dua) ruangan, telah direhab menjadi 5 (lima) ruangan dan 1 (satu) ruang WC berdasarkan DIPA T.A. 2007.
 Pada DIPA T.A. 2008 ditambah 2 (dua) ruangan kerja dan 1 (satu) WS serta bangunan tangga.

3. Gedung kantor Lantai I berbentuk “Letter U” dibangun tahun 1978 sebanyak 13 ruangan dan 2 ruangan WC yang telah di rehabilitasi pada DIPA T.A. 2008.

BAB III

TEMPAT SIDANG (*Zitting Plaatsen*)

- Ruang sidang terletak pada lantai I bangunan Gedung Kantor dengan status tanah merupakan milik Pemerintah RI yang kuasa penggunaannya pada Pengadilan Negeri Dompnu.
- Ruang Sidang berjumlah 3 ruang, masing-masing terletak pada pojok gedung kantor lantai I “Letter U” yang merupakan bangunan sejak tahun 1978, telah direhabilitasi sebagaimana dalam DIPA T.A. 2008 dan T.A. 2009 (bentuk ruang sidang dapat dilihat pada gambar).
- Manfaat utama ketiga ruang sidang tersebut sebagai ruang persidangan.

BAB IV

PERSONIL

Jumlah Hakim dan Pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Klas II Dompnu sampai saat ini berjumlah 45 orang dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL.	PEKERJAAN / JABATAN
1.	Sulistiyono, SH.	Pembina Tk. I (IV/b)	KETUA PN
2.	Saifudin Zuhri, SH., M.Hum.	Pembina (IV/a)	WAKIL KETUA PN
3.	A. Hair, SH., MM.	Penata Tk. I (III/d)	PANSEK
4.	Muhtar, SH.	Penata Tk. I (III/d)	WAPAN
5.	M. Saleh Mahmud	Penata (III/c)	PANMUD HUKUM
6.	Syaiful	Penata (III/c)	WASEK
7.	Syahrul	Penata Muda Tk. I (III/b)	PANMUD PERDATA
8.	Putu Gde Novyatha, SH,M.Hum	Penata Muda Tk. I (III/b)	HAKIM
9.	I Putu Agus Adi Antara, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	HAKIM
10.	Agus Ardianto, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	HAKIM
11.	Ronny Widodo, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	HAKIM
12.	A.A.Gde Oka Mahardika, SH	Penata Muda Tk. I (III/b)	HAKIM
13.	Risqa Yunia, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	HAKIM
14.	Dony Riva Dwi Putra, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	HAKIM

15.	A.A.A. Cristin AgustinI, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	HAKIM
16.	Siti Rahmah	Penata Muda Tk. I (III/b)	PP
17.	Muhammad Iya, SH	Penata Muda Tk. I (III/b)	PLH PANMUD PIDANA/PP
18.	Upy Supriyatna, ST.	Penata Muda Tk. I (III/b)	KAUR UMUM
19.	Hairul	Penata Muda Tk. I (III/b)	P P
20.	Ahmad Zaim, SE.	Penata Muda Tk. I (III/b)	KAUR KEUANGAN
21.	Agus Susantijo, SH	Penata Muda (III/a)	PP
22.	Vilaningrum Wibawani, SH	Penata Muda (III/a)	HAKIM
23.	Marjani Eldiarthi, SH	Penata Muda (III/a)	HAKIM
24.	I Gusti Putu Yastriani, SH	Penata Muda (III/a)	HAKIM
25.	Rosdiana	Penata Muda (III/a)	P P
26.	Lalu Muh. Nur	Penata Muda (III/a)	PP
27.	Rosita	Penata Muda (III/a)	KAUR KEPEGAWAIAN
28.	Emalia Pramita, SH	Penata Muda (III/a)	CALON PP (PP LOKAL)
29.	Yasin	Penata Muda (III/a)	P P
30.	Ahya Adhitya, SE	Penata Muda (III/a)	STAF KEUANGAN
31.	Ikhsan Suharyadi, S.Kom	Penata Muda (III/a)	STAF PIDANA
32.	Ermin Saputra, SE	Penata Muda (III/a)	STAF KEUANGAN
33.	Jarot Sujatmiko, SE	Penata Muda (III/a)	STAF KEPEGAWAIAN
34.	Dewi Nurlaela	Penata Muda (III/a)	PP
35.	Siti Nurliana	Pengatur Tk. I (II/d)	P P
36.	Latifa Wijayanthy Mala, A.Md	Pengatur (II/c)	BENDAHARA RUTIN
37.	Ramlah	Pengatur (II/c)	JURUSITA PENGGANTI
38.	Ahmad	Pengatur (II/c)	JURUSITA PENGGANTI
39.	Hamdan	Pengatur (II/c)	JURUSITA PENGGANTI
40.	Sudirman, A.Md.	Pengatur (II/c)	STAF UMUM
41.	Bambang Sugiharto, A.Md	Pengatur (II/c)	STAF PERDATA
42.	Nurmala	Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENERIMA
43.	M. Halik Fabasyhir	Pengatur Muda (II/a)	STAF UMUM
44.	R.B. Much. Alief ardiya W.	Pengatur Muda (II/a)	STAF PIDANA
45.	Mira Restu	Pengatur Muda (II/a)	STAF UMUM

BAB V

PERKARA

Keadaan Perkara Sampai dengan akhir tahun 2010 pada Pengadilan Negeri Dompus sebagai berikut :

No.	PERKARA PIDANA	JUMLAH		KETERANGAN
		BIASA	SINGKAT	
1.	Sisa Tahun 2009	47	-	
2.	Masuk dalam Tahun 2010	229	-	
3.	Putus	238	-	
4.	Terdakwa / Jaksa Menerima	-	-	
5.	Terdakwa / Jaksa Minta Banding	36	-	
6.	Terdakwa / Jaksa Minta Kasasi	27	-	
7.	PK (Peninjauan Kembali)	4	-	
8.	Terdakwa Minta Grasi	-	-	

No.	PIDANA CEPAT / RINGAN / LALU LINTAS	JUMLAH		KETERANGAN
		BIASA	SINGKAT	
1.	Sisa Tahun 2009	-	-	
2.	Masuk dalam Tahun 2010	44	1534	
3.	Putus	44	1534	
4.	Kasasi	-	-	
5.	Grasi	-	-	

No.	PERKARA PERDATA GUGATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Sisa Tahun 2009	28	
2.	Masuk dalam Tahun 2010	25	
3.	Putus	37	
4.	Para Pihak Menerima	8	
5.	Para Pihak Minta Banding	23	
6.	Para Pihak Minta Kasasi	6	
7.	Para Pihak Minta PK (Peninjauan Kembali)	1	
8.	Dilaksanakan Eksekusi	5	

No.	PERKARA PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Sisa Tahun 2009	-	
2.	Masuk dalam Tahun 2010	10	
3.	Putus	10	

BAB VI

WILAYAH

A. Pembagian Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dompu

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dompu berada diantara wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa dan Pengadilan Negeri Bima (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Mataram). Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dompu meliputi seluruh wilayah Kabupaten Dompu yaitu : 8 Kecamatan dengan 61 Desa / Lurah.

Tabel 1. Banyaknya Desa, kelurahan, Dusun, Lingkungan dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan tahun 2009.

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan	Rukun tetangga
1.	Hu'u	6	-	28	-	70
2.	Pajo	5	-	20	-	53
3.	Dompu	8	6	32	26	173
4.	Woja	9	3	49	18	189
5.	Kilo	6	-	24	-	61
6.	Kempo	7	-	26	-	97
7.	Manggalewa	10	-	44	-	137
8.	Pekat	10	-	61	-	213
Jumlah		61	9	284	44	993

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Dompu

B. Tanah

Tanah dalam hal ini daratan Kabupaten Dompu sebagian besar berupa perbukitan dan lahan pertanian serta lahan yang telah diubah fungsi sebagai sarana dan prasarana wilayah baik berupa bangunan gedung maupun sarana umum lainnya. Selain itu juga berupa kawasan pantai dan sungai-sungai.

Kepemilikan tanah sebagian besar merupakan hak milik sedangkan sisanya berupa Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

BAB VII

PENDUDUK

Penduduk Kabupaten Dompu sampai dengan tahun 2010 tercatat 312.185 jiwa terdiri dari 106.240 laki-laki dan 106.945 perempuan, dengan rumah tangga sebanyak 50.130. tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2010 sebesar 92 jiwa / km² dan rata-rata rumah tangga dihuni oleh 4 jiwa.

Jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk per km² menurut kecamatan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Per km² Menurut Kecamatan Tahun 2010.

No.	KECAMATAN	PENDUDUK (Jiwa)	LUAS WILAYAH (KM ²)	KEPADATAN PENDUDUK
1.	Hu'u	16.319	168,50	88
2.	Pajo	12.723	135,32	94
3.	Dompu	47.743	223,27	214
4.	Woja	50.423	301,16	167
5.	Kilo	11.572	235,00	49
6.	Kempo	18.842	191,67	98
7.	Manggalewa	27.234	176,46	154
8.	Pekat	28.329	875,17	32
Jumlah		213.185	2.324,55	902

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Dompu

1. Golongan

- a. WNI, terdiri dari : penduduk priobumi / asli dan kaum pendatang (termasuk dari Nusa Tenggara Barat) serta keturunan Asing.
- b. WNA, terdiri dari : orang-orang asing seperti Cina, Arab dan dari Australia dan Selandia Baru, Eropa, Afrika serta Amerika.

2. Agama

Jumlah penduduk Kabupaten Dompu menurut Agama dan Kepercayaan sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Banyaknya Penduduk menurut Agama dan Kecamatan tahun 2010

No.	KECAMATAN	Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
1.	Hu'u	16.388	15	11	25	-	-	16.439
2.	Pajo	16.281	6	-	12	-	-	16.299
3.	Dompu	49.500	297	206	159	18	-	50.180
4.	Woja	50.624	57	35	247	5	-	50.968
5.	Kilo	11.596	-	14	76	-	-	11.686
6.	Kempo	16.310	20	2	2.138	-	-	18.470
7.	Manggalewa	31.937	4	163	632	-	-	32.736
8.	Pekat	27.799	10	-	294	-	-	28.103
Jumlah		220.453	409	431	3585	23	-	224.881

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Dompu

3. Mata Pencaharian

Jumlah penduduk menurut lapangan usaha atau pekerjaan dan jenis kelamin ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Dan Jenis Kelamin Tahun 2010

No.	LAPANGAN USAHA UTAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pertanian	13.957	7.866	21.823
2.	Perkebunan	6.174	3.984	9.858
3.	Perikanan	2.976	1.319	4.295
4.	Peternakan	1.473	456	1.929
5.	Pertanian Lain	1.220	75	1.295
6.	Industri	3.537	2.147	5.684
7.	Perdagangan	2.937	6.976	9.913
8.	Jasa-Jasa	8.349	5.931	14.280
9.	Angkutan	6.362	497	6.859
10.	Lainnya	3.041	76	3.117
Jumlah		50.026	29.027	79.053

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Dompus

BAB VIII

PEREKONOMIAN

Struktur perekonomian Kabupaten Dompus masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor lain yang memberikan sumbangan cukup besar adalah sektor perdagangan khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran diikuti oleh sektor jasa-jasa dan bangunan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompus tahun 2010 menurut data BPS kabupaten Dompus mencapai 4,97 % yang sebelumnya mencapai 4,11%.

Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku tahun 2010 adalah 6,610 juta rupiah dan PDRB perkapita atas harga berlaku tahun 2006 adalah 5,978 juta rupiah yang berarti mengalami peningkatan sebesar 10,57 %.

BAB IX

PENDIDIKAN

Pendidikan di Kabupaten Dompu yang meliputi jumlah sekolah dan tingkat pendidikan masyarakatnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Banyaknya Sekolah Dirinci Menurut Tingkat Dan Status Sekolah Tahun 2010

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH		JUMLAH
		NEGERI	SWASTA	
1.	TK	2	61	63
2.	SD	206	-	206
3.	SLTP	31	7	38
4.	SLTA	11	5	16
5.	SMK	5	1	6
6.	STM	-	-	0
Jumlah		255	74	329

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Dompu

Selain jumlah sekolah sebagaimana tabel 5 di atas masih terdapat juga Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan tinggi di Kabupaten Dompu dengan jumlah sekitar 3 (tiga) Perguruan Tinggi dengan 1 Gedung milik sendiri, belum termasuk masyarakat yang melakukan perkuliahan jarak jauh.

Tabel 6. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin Tahun 2010.

No.	PENDIDIKAN TERTINGGI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Tidak / Blm pernah sekolah	7.108	14.008	21.116
2.	Tidak / Blm Tamat SD	23.098	23.683	46.781
3.	SD	16.700	19.450	36.150
4.	SLTP	16.293	13.654	29.947
5.	SLTA	14.097	12.163	26.260
6.	DIPLOMA / AKADEMI	1.646	2.744	4.390
7.	Universitas	3.608	2.561	6.169
Jumlah		82.550	88.263	170.813

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Dompu

BAB X**KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA**

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Dompus masih banyak diliputi suasana kekeluargaan dan gotong royong. Dalam hal kekeluargaan umumnya berlaku atas dua lapisan masyarakat, yaitu : bangsawan dan rakyat biasa, meskipun ada pula kelompok masyarakat kekerabatan ulama / kyai dan juga kaum pendatang.

Nilai keagamaan khususnya Islam kental berlaku pada adat kebudayaan masyarakat Kabupaten Dompus, Kabupaten Dompus dapat dilihat pada tarian musik maupun lagu daerah adat upacara-upacara daerahnya.

BAB XI**BAHASA**

Bahasa daerah yang berlaku pada masyarakat Dompus secara khusus tidak ada namun menggunakan Bahasa mbojo (Bima) karena masih merupakan satu suku dengan masyarakat Bima, Masyarakat Dompus sebagian besar penutur Bahasa Mbojo.

Bahasa Indonesia digunakan sebagai Bahasa Nasional dan bahasa pergaulan khususnya di wilayah perkotaan. Selain itu berlaku juga bahasa daerah yang digunakan oleh penutur daerah masing-masing kaum pendatang.

BAB XII**LALU LINTAS DAN PARIWISATA**

Lalu Lintas perhubungan yang tersedia untuk sampai ke Kabupaten Dompus dapat ditempuh melalui perjalanan darat maupun perjalanan udara, bisa menggunakan sarana bus dari Mataram dapat ditempuh selama 10-12 jam perjalanan, termasuk menyeberangi Selat Alas menggunakan Kapal Laut sekitar 2 jam. Kalau menggunakan pesawat terbang menempuh rute Denpasar - Bima selama sekitar 1 jam atau rute Mataram – Bima selama sekitar 30 menit dan ditambah perjalanan darat lagi menggunakan taksi sekitar 1 jam perjalanan.

Lalu lintas tidak padat dan jarang terjadi kemacetan, kemacetan sering terjadi disebabkan oleh acara keagamaan / adat ataupun secara nasional dan lokal serta pasar tumpah.

Obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan antara lain : Pantai Lakey (tempat berselancar / *surfing*) pernah dijadikan lokasi lomba selancar nasional dan internasional juga digunakan sebagai lokasi pertandingan Volly pantai, selain itu obyek wisata lainnya : Madaprana (taman dan kolam renang), Pantai Ria, Pantai Hodo, Pantai Jambu, Felo Janga (rekreasi pantai) dan masih banyak obyek wisata lainnya.

BAB XIII

SEJARAH PENGADILAN

A. Wilayah Hukum Pengadilan

Sebelum tahun 1973 Kabupaten Dompnu adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Jarak dari Kota Kabupaten Bima dengan kabupaten Dompnu adalah 64 KM, Belum lagi jarak ke kota ke kota kecamatan yaitu; Kecamatan Dompnu ke Kecamatan Kempo, Hu'u dan kilo. Meskipun kota Kabupaten Dompnu dengan Kota Kabupaten Bima cukup jauh Pengadilan Negeri Raba Bima tidak mempunyai system place di kabupaten Dompnu, bila masyarakat Kabupaten Dompnu mencari keadilan, semua harus sidang di Pengadilan Negeri Raba – Bima sementara transportasi sangat sulit sehingga para pencari keadilan yang berasal dari Kabupaten Dompnu harus menginap di kota Bima.

Mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, transportasi yang sulit, system place tidak ada serta besarnya pengorbanan para pencari keadilan, maka Departemen Kehakiman RI kantor wilayah Departemen Kehakiman Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar Bali akhirnya mengembangkan satuan unit kerja Pengadilan Negeri Dompnu pada tahun 1973.

B. Pembangunan Gedung Kantor

1. Pada tahun 1973 dibangun sebuah gedung kantor Pengadilan Negeri Dompnu di atas tanah seluas 80m x 80m dengan luas 13,5 x 14 m yang terdiri dari :

- a. Gedung kantor pada lantai I : 7 ruangan yaitu : 5 ruang kerja untuk hakim, panitera pengganti dan staf , 1 ruangan gudang dan 1 ruangan WC;
 - b. Gedung kantor pada lantai II : seluas 10 m x 4 m terdiri dari 2 ruangan yaitu : 1 ruangan Ketua dan 1 ruangan Panitera Sekretaris .
2. Pada tahun 1978 Pengadilan Negeri Dompus mendapat pengadaan perluasan gedung kantor yaitu membangun lagi gedung baru dengan bentuk "letter U" mengelilingi induk dan pada gedung baru dibangun tersebut terdapat sebanyak 16 ruangan terdiri dari 2 ruangan sidang, 14 ruangan kerja dan 2 wc.

C. Struktur Organisasi

Sejak di bangun Gedung Kantor Induk pada tahun 1973 dan operasionalnya digunakan secara resmi pada tahun 1974 dengan jumlah personil hanya 5 orang, terdiri dari 2 orang hakim, 1 orang panitera kepala, 1 orang panitera pengganti dan 1 orang karyawan, kondisi tersebut berjalan sampai dengan tahun 1976.

Secara historis sejak berdirinya sebuah unit kerja Pengadilan Negeri Dompus pada tahun 1973, sudah cukup banyak para mantan ketua dan panitera yang bertugas pada Pengadilan Negeri Dompus, secara estafet dapat dilihat pada table berikut :

No	Ketua	TMT	Panitera	TMT
1.	Prasanca, SH.	1974-1975	Wyn Nukis	1974-1984
2.	Muh. Dalael, SH., MH.Phd.	1975-1979	Wyn Nukis	1974-1984
3.	St.Aisyah M.,SH.	1979-1983	Matanasi Yan, SH.	1984-1990
4.	Muh. Ishak	1983-1987	M.Adi Koro, SH.	1990-1993
5.	Arbani Projodiharjo, SH.	1987-1991	Syarifudin Said, SH.	1993-2000
6.	Sukidjan	1991-1993	Muh.Amin,SH.	2000-2002
7.	I Gede Sumitra, SH.	1993-1996	Lalu Suparlan, SH.	2002-2005
8.	Matheus Ratuligi, SH.	1996-1999	A. Hair, SH.	2005 – Skrg
9.	A.Wahid Idris, SH.	1999-2000		
10.	I Made Sukadana,SH.	2003-2007		

11.	Made Sutrisna, SH., M.Hum.	2007-2008		
12.	Sulistiyono, SH.	2008 – Skrg		

Berdasarkan historis lembaga peradilan, dahulu berada dibawah naungan Departemen Kehakiman dan juga dibawah Mahkamah Agung RI, sehingga secara birokrasi telah terjadi kontradiksi kewenangan, mengakibatkan lembaga peradilan kurang mendapat perhatian dari Departemen Kehakiman.

Kemudian atas perkembangan jaman dalam era Reformasi kondisi birokrasi dua atap tersebut menjadi satu atap pada Mahkamah Agung RI untuk lembaga peradilan dari empat lingkungan badan peradilan.

Setelah berada dibawah satu atap Mahkamah Agung RI segala kekurangan pada badn peradilan mendapat perhatian khusus sehingga pengadaan gedung kantor baru dan rehabillitasi gedung kantor lama selalu diberikan dana secara bertahap setiap tahun, demikian juga perbaikan sarana dan prasarana lainnya.

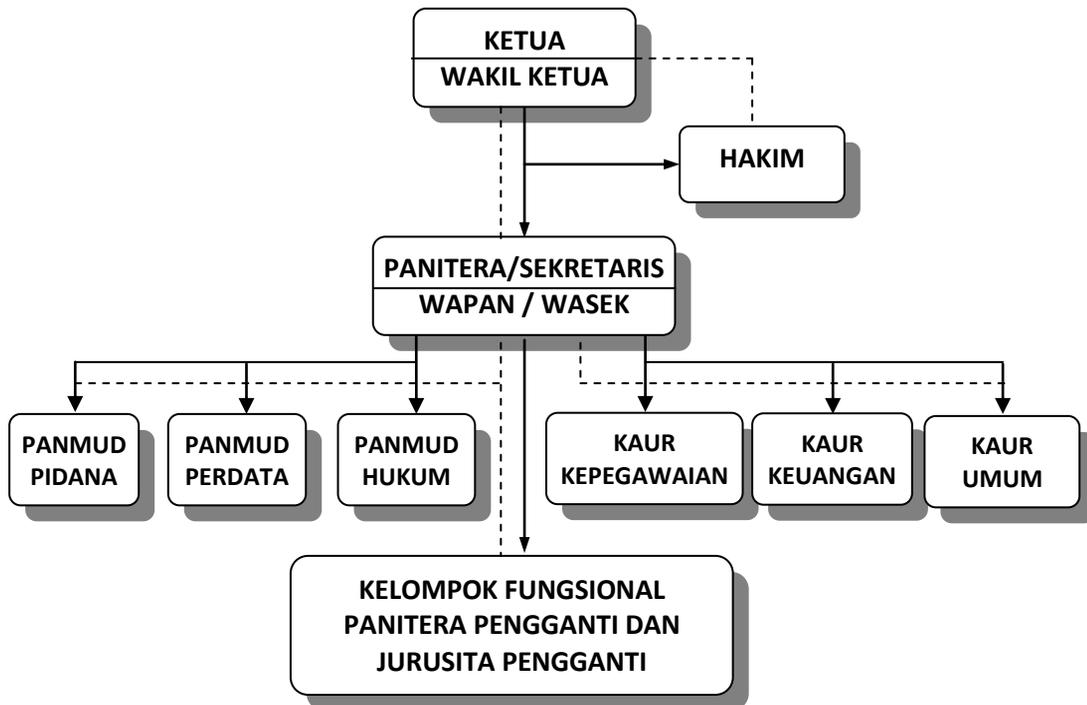
Atas dasar perhatian dan perbaikan fasilitas tersebut,maka khusus Pengadilan Negeri Dompnu sebagai salah satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI diberikan dana untuk rehabilitasi gedung kantor dengan pedoman Standar Proto Type gedung kantor Pengadilan yang seragam secara nasional, sehingga pada tahun anggran 2007 gedung kantor Pengadilan Negeri Dompnu telah direhabilitasi dengan kondisi 76% sesuai kemampuan sebagaimana realisasi DIPA TA. 2007.

Selanjutnya untuk menyelesaikan kegiatan rehabilitasi gedung kantor yang masih tersisa tersebut, maka Pengadilan Negeri Dompnu telah menyusun RKA-KL 2008 dan oleh Mahkamah agung RI telah merealisasi dalam DIPA T.A 2008, termasuk rehabilitasi gedung kantor I "letter U" yang dibangun Tahun 1978 tersebut, yang pelaksanaanya dimulai bulan April 2008.

Pada DIPA T.A. 2009 dilaksanakan perbaikan dan pemeliharaan gedung dan lingkungan sekitar gedung termasuk sarana dan prasarana lainnya. Pada tahun 2009 juga berhasil dilaksanakan pemasangan jaringan informasi teknologi berbasis internet.

Struktur organisasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan berlaku, maka struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Dompnu telah lengkap sehingga dalam menyelenggarakan administrasi teknis maupun administrasi umum semuanya lancar meskipun personil yang ada masih melaksanakan tugas rangkap.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Dompus sebagai berikut :



BAB XIV

HUKUM ADAT

Kabupaten Dompus tidak mempunyai hukum adat yang kental, akan tetapi secara tradisional masih berlaku adat kebiasaan di tengah masyarakat, misalnya masalah jual beli, gadai, mengangkat anak, wasiat dan hibah yang bersumber dari hukum Islam.

Oleh karena itu ada pengukuhan hukum adat melalui pemangku Hukum Adat, maka jika terjadi perselisihan masalah jual beli atau gadai, penyelesaian bukan melalui Pemangku Adat tetapi melalui Pengadilan dan yang berlaku adalah Hukum Positif (perjanjian) yang bersumber dari Hukum Perdata.

Selanjutnya kami paparkan juga mengenai anak angkat berdasarkan adat kebiasaan, dimana anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, akan tetapi adat kebiasaan itu sangat lemah karena tidak mempunyai Pemangku Adat, ia akan lemah dipengaruhi oleh jaman dan waktu.

Di Kabupaten Dompus pada tahun 1992 sudah pernah dilakukan penelitian Hukum Adat di Kecamatan Hu'u pada 3 Desa yang konon kuat Hukum Adatnya yaitu Desa Rasabou, Desa Daha dan Desa Hu'u. Lembaga yang melakukan penelitian adalah Pengadilan Tinggi Mataram di bantu oleh Pengadilan Negeri Dompus, hasil

penelitian tersebut tidak terdapat Pemangku Adat sehingga Hukum Adat yang ada tidak mengikat.

BAB XV

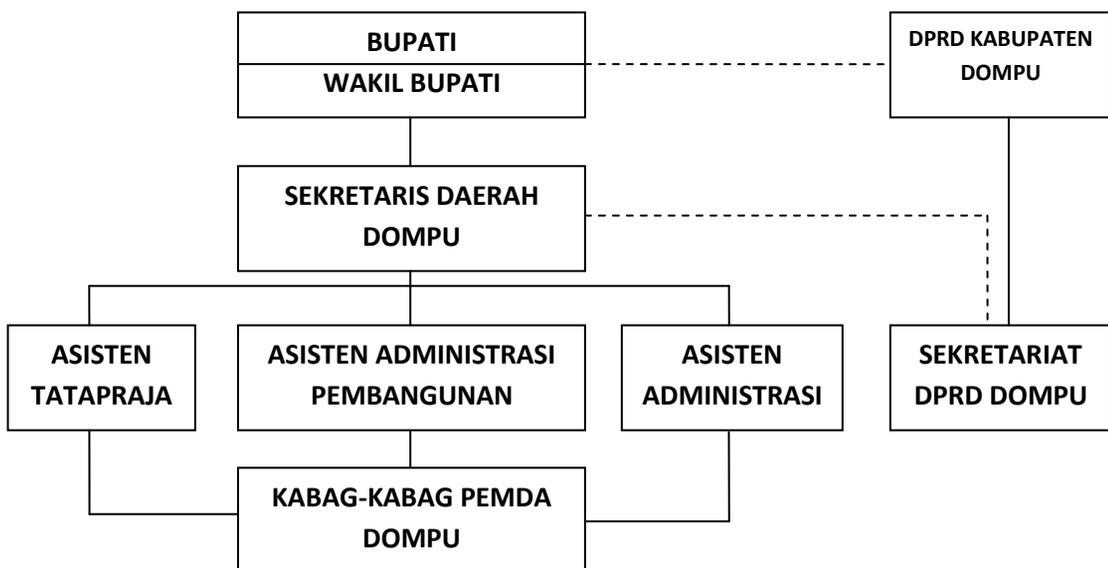
PEMERINTAH DAERAH / LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Dompu awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 69 Tahun 1958 (Lembaga Negara Nomor 122 Tahun 1958) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah yang berlaku pada awalnya berupa kesultanan, adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah Kabupaten Dompu banyak berbenah untuk mensejajarkan dirinya dengan Kabupaten / Kota dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat bahkan secara Nasional dengan seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia hal ini Nampak pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan tata pemerintahan yang terus membaik.

Dalam tata pemerintahan daerah Kabupaten Dompu dipimpin oleh seorang Bupati atas nama Drs. H Bambang M. Yasin dan Wakil Bupati atas nama Drs. H Syamsudin H Yasin, MM., terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dan dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah atas nama Drs. H. Zaenal Arifin beserta didukung oleh para Assisted an Kabag-Kabag dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Dompu.

Bagan Struktu Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Dompu berdasarkan Perda Nomor : 04 tahun 1992 sebagai berikut :



Lembaga Penegak Hukum yang ada di Kabupaten Dompus terbilang lengkap baik aparat Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan maupun Lembaga Penegak Hukum lainnya telah ada dan melaksanakan fungsinya secara baik sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XVI

MASALAH YANG DIHADAPI SEKARANG

Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih kurangnya sumber daya manusia baik jumlah maupun kemampuan hal ini menimbulkan masih adanya tugas-tugas yang dirangkap oleh beberapa personil dan juga belum optimalnya kinerja masing-masing personil sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Secara lebih terinci masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya staf / personil terutama tenaga non teknis, seperti pada sub Personalia dan Keuangan.
2. Masing kurangnya kemampuan personil dalam menggunakan komputer dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
3. Masih kurangnya pelatihan-pelatihan khususnya bidang teknis bagi para Panitera Pengganti dan Jurusita serta Jurusita Pengganti termasuk dalam menggunakan komputer dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor.
4. Belum ada pelatihan khusus mengenai Sistem Informasi Berbasis Internet.
5. Masih kurangnya ruangan untuk tahanan anak dan wanita, ruang arsip dan pos bakum, sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan mbelum maksimal.

BAB XVII

MASALAH PERSIDANGAN / FORMULIR / REGISTRASI PERKARA

Pengadilan Negeri Dompus mempunyai gedung induk berlantai II dan memiliki 3 (tiga) ruangan sidang. Dari jumlah Majelis Hakim sebanyak 4 (empat) Majelis dengan volume perkara yang diadili pada Pengadilan Negeri Dompus di anggap cukup memadai tidak ada hambatan dalam arti pelaksanaan persidangan cukup lancar.

Untuk Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara / penasehat Hukum telah disediakan masing-masing 1 (satu) ruangan tersendiri sehingga satu dengan lainnya tidak saling mengganggu pada saat menunggu pelaksanaan persidangan.

Formulir dan Registrasi Perkara baik perkara Perdata maupun perkara Pidana sudah cukup memadai sehingga dalam penyelenggaraan administrasi teknis pada Pengadilan Negeri Dompus dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Permasalahan dalam register perkara hanya terletak pada kurang telitinya penomoran dan kelambatan dalam minutasasi perkara sehingga terkadang ada kesulitan dalam register dan pengiriman berkas.

BAB XVIII

LAIN-LAIN

A. Usul

1. Register perkara perdata dan pidana, kami usulkan agar dalam bulan Desember sudah diterima pada Pengadilan Negeri Dompus.
2. Jumlah Hakim 12 Orang dan Jumlah Panitera Pengganti 14 Orang, dengan jumlah personil tersebut kami usulkan agar mengirimkan Toga sesuai dengan jumlah Hakim dan Jas Panitera sesuai dengan jumlah Panitera / panitera Pengganti yang ada pada Pengadilan Negeri Dompus.
3. Untuk memenuhi kebutuhan ruangan yang masih kurang tersebut, maka usulan dari Pengadilan Negeri Dompus untuk mendapat Dana Rehabilitasi perluasan Gedung Kantor dapat disetujui lebih lanjut.
4. Mengingat kondisi lampu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sering padam secara tidak menentu dan tegangan listrik yang tidak stabil dan kurangnya daya, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari, maka usulan dari Pengadilan Negeri Dompus untuk pengadaan Generator Tenaga Listrik dapat disetujui lebih lanjut, sehingga pelaksanaan operasional peralatan / mesin perangkat komputer dan pekerjaan Kantor dapat dilaksanakan secara optimal.

B. Saran

Mengingat topografi wilayah Kabupaten Dompus yang berbukit-bukit dan infrastruktur yang tidak memadai, terutama berkaitan dengan pemeriksaan obyek sengketa berupa tanah dan pengantaran relas, selayaknya di Pengadilan Negeri Dompus mendapat pengadaan motor dinas untuk operasional sebab motor dinas yang ada kondisinya sudah rusak berat.